



# DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4377>

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDO KABUPATEN MINAHASA UTARA

Nancy M Onibala<sup>1</sup>, Noudy Tendean<sup>2</sup>, Rahma A Alhasni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Manado, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Manado, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

*Article history:*

Received date: 1 Januari 2024

Revised date: 10 Januari 2024

Accepted date: 31 Januari 2024

### ABSTRACT

*The development of a tourist village is expected to be equitable in accordance with the concept of sustainable tourism development. Tourism potential exists in Budo village in the form of natural tourism in the form of beaches, underwater and mountains; Cultural Tourism in the form of arts, customs and traditional culinary; Educational Tourism in the form of mangrove forests and underwater potential. Budo village also has handicrafts in the form of Ginto crafts that can be used as souvenirs typical of Budo village. The community has also prepared a home stay for visiting tourists. Collaborative governance is something interesting to study in the development of Budo tourism village, because it involves various local government organisations, Kerta village community, private sector and others. This research uses a qualitative method with a descriptive approach through determining informants using non-probability sampling techniques by purposive sampling. The results of this study are where the management of Budo Tourism Village still only relies on the community, the contribution of the government and the private sector is still minimal. So it still needs to be improved again for the role of other stakeholders.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Tourism Development, Tourism Village

### ABSTRAKSI

Pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Potensi wisata ada di desa Budo berupa Wisata alam berupa pantai, bawah laut dan pegunungan; Wisata Budaya berupa kesenian, adat istiadat dan kuliner tradisional; Wisata Edukasi berupa hutan mangrove dan potensi bawah laut. Desa Budo juga memiliki kerajinan tangan berupa kerajinan Ginto yang dapat dijadikan souvenir khas desa Budo. Juga sudah disiapkan oleh masyarakat home stay bagi wisatawan yang berkunjung. Collaborative governance menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti dalam pengembangan desa wisata Budo, karena melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah, masyarakat desa Kerta, Swasta dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah dimana pengelolaan Desa wisata Budo masih hanya mengandalkan masyarakat, kontribusi dari pemerintah dan pihak swasta masih minim. Sehingga masih perlu ditingkatkan lagi untuk peran dari stakeholders yang lain.

**Kata Kunci :** Collaborative Governance, Pengembangan Pariwisata, Desa Wisata

## **PENDAHULUAN**

Usaha pengembangan sektor pariwisata di Indonesia didukung oleh Undang-undang nomor 10 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah kewenangan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui peraturan ini telah memberikan peluang bagi pembangunan wisata berbasis masyarakat terdesentralisasi, sehingga memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, karena masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan, persoalan dan potensi untuk memecahkan masalah pembangunan sebuah destinasi wisata [1].

Dalam sejarah pembangunan di banyak negara, khususnya dalam dua dekade terakhir sektor kepariwisataan telah terbukti berperan penting dalam menyumbang perekonomian bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa yang menjadikan pariwisata sebagai industri hilirnya untuk mengungkit pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor usaha yang ada di depan dan belakangnya (sunaryo).

Indonesia telah mendapat pengakuan dari WTC (World Trade Center) dengan dikeluarkannya WTTC Safe Travels Stamp for Safety Protocols untuk Indonesia pada 24 Juli 2020 (WTTC, 2020). Hal ini menjadi potensi dan kesempatan besar bagi Indonesia untuk menarik wisatawan, baik dalam maupun luar negeri agar berkunjung ke Indonesia. Salah satu tren pariwisata yang dapat dilakukan adalah mengembangkan desa wisata. Desa Wisata adalah kelompok masyarakat dan swadaya yang dalam kegiatan sosialnya berupaya meningkatkan pemahaman tentang pariwisata, dengan memperhatikan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, untuk meningkatkan nilai pariwisata dan menyediakan sarana untuk berkontribusi pada

kesejahteraan Masyarakat, turut serta mensukseskan pembangunan pariwisata [2].

Dalam proses pengembangan desa wisata, masyarakat sekitar dijadikan sebagai subyek aktif, artinya lingkungan sekitar dan kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut dijadikan sebagai tujuan wisata. Masyarakat juga berperan sebagai agen promosi wisata serta inovator dalam memberikan ide gagasan pengembangan desa wisata. Pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar desa wisata yang diorganisir secara maksimal, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang diperoleh dari kegiatan desa wisata akan dikembalikan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, konsep desa wisata akan menjadikan suatu desa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, budaya, serta tradisi desa tersebut [3].

Desa Budo terletak di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara merupakan desa wisata dengan keindahan Hutan Mangrove dan Dermaga Budo. Berbagai potensi wisata ada di desa Budo berupa Wisata alam berupa pantai, bawah laut dan pegunungan; Wisata Budaya berupa kesenian, adat istiadat dan kuliner tradisional; Wisata Edukasi berupa hutan mangrove dan potensi bawah laut [4].

Sebagai destinasi desa wisata yang mulai berkembang, pengembangan desa wisata Budo dilakukan oleh masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas [5].

Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (buku collaborative ugm). Collaborative governance berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari pihak yang terikat [6]. Pihak tersebut

tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama [7].

Argumen dalam penelitian ini bahwa pengembangan desa wisata budo masih bertumpuh pada peran sektor masyarakat lokal yang tergabung dalam komunitas masyarakat desa wisata. Peran pemerintah dan sektor swasta masih minim. Sehingga collaborative governance tidak menunjukkan hasil yang maksimal dalam pengembangan desa wisata Budo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Budo, kabupaten Minahasa utara provinsi Sulawesi utara. Penelitian ini difokuskan Pada Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata Budo Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara purposive sampling, dimana kebutuhan informasi didapatkan melalui informan-informan yang telah ditetapkan sebelumnya serta dipandang memiliki kompetensi yang baik sesuai kebutuhan penelitian Jumlah informan dalam penelitian ini 15 orang. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi literature, Wawancara, dan Observasi. Proses Analisa data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari : data collection, data display, data condensation dan conclusions [8].

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengembangan Obyek daya tarik wisata pada Desa Wisata Budo**

Pengembangan desa wisata dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya, yaitu pengembangan obyek daya tarik

wisata, yang meliputi ; (1) pengembangan atraksi wisata, (2) pengembangan fasilitas pelayanan, dan (3) pengembangan aksesibilitas [9].

### **Pengembangan atraksi wisata**

Atraksi wisata harus memiliki daya tarik khusus yang dapat dijadikan “entertainment” bagi wisatawan. Badan pengelola desa wisata Budo melihat bahwa potensi alam wisata Budo memang indah dan menjual, tetapi akan lebih menarik bila tersedia atraksi yang menantang namun tidak merusak alam. Hutan [10]

### **Pengembangan Akomodasi**

Akomodasi di Desa wisata Budo, terdiri dari Homestay, rumah makan, dan tempat penjualan cenderamata. Homestay berjumlah 10, rumah makan 10, dan tempat souvenir ada 5.

### **Pengembangan aksesibilitas**

Akses yang mudah bila dari pusat kota Manado kurang lebih 45 menit, dan dari ibukota Minahasa Utara 30 menit. Lokasi yang mudah di jangkau membuat destinasi wisata budo menjadi tempat favorit untuk masyarakat, terutama di sore hari saat matahari terbenam.

### **Proses Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Budo**

Proses kolaborasi dalam pengembangan desa wisata melalui Budo, antara lain;

- a. Perjanjian Kerjasama antara BUMN sponsor dengan Pemerintah Desa Kerjasama yang dilakukan diawali dengan permintaan dari Pemerintah Desa Budo bersama PT.PLN Persero melalui kerjasama pengelolaan sampah, karena di desa wisata Budo ada hutan mangrove yang harus dilestarikan keberadaannya. Sehingga pariwisata desa Budo tetap berkelanjutan.
- b. Pembangunan tenant UMKM bagi pelaku usaha di wilayah desa Budo Bank Indonesia, PT.PLN Persero dengan Pemerintah Desa Budo telah melaksanakan pembangunan tenant UMKM, dan beberapa tempat untuk kegiatan pariwisata menunjang desa wisata Budo.
- c. Pendampingan dalam pengelolaan homestay oleh Perguruan tinggi Politeknik Negeri Manado, ada 10 homestay yang dikelola bersama. Pendampingan UMKM oleh BUMN PNM mekar kepada masyarakat lokal desa wisata Budo [11].

### **Collaborative Governance dalam pengembangan Desa Wisata Budo**

1.Face to Face (dialog tatap muka) Menurut Ansell dan Gash, Collaborative Governance dibangun melalui dialog maupun komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan atau stakeholders. Proses dari kolaborasi berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, hal tersebut kemudian menjadikan komunikasi dengan tatap muka menjadi tahap yang sangat penting pada proses kolaborasi [12]. Proses tatap muka tersebut menjadi inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen terhadap proses. Dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata Budo, pertemuan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tidak pernah dilakukan bersamaan. Pertemuan biasanya antara pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa tanpa masyarakat. Pertemuan antar pemerintah desa, dan masyarakat, atau pertemuan pihak swasta langsung dengan masyarakat.

## **2.Membangun Kepercayaan**

Terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari terjalannya komunikasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa wisata Budo. Proses awal terbentuknya rasa saling percaya tidak terlepas dari visi dan misi yang sama dalam hal ini untuk keberlanjutan pariwisata di kawasan tersebut. Selain itu kepercayaan juga terbentuk dari komunikasi yang dilakukan secara informal yang berkelanjutan antara seluruh pihak sehingga diharapkan berdampak pada keterbukaan masing masing stakeholders dalam memberikan perspektifnya sehingga tujuan yang dicanangkan di awal dapat dicapai. Dalam membangun kepercayaan melalui komunikasi masih kurang maksimal, hal ini disebabkan karena pertemuan dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun swasta secara bersamaan belum pernah dilakukan [13].

## **3.Komitmen terhadap Proses (Comitment to Process)**

Komitmen masing masing stakeholders mengacu pada Kontrak Kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati Bersama. Pemerintah desa harus lebih memaksimalkan kontribusi dalam pengembangan desa wisata Budo, dari sektor swasta pun diharapkan untuk dapat meningkatkan kontribusinya. Berdasarkan wawancara dilapangan diakui bahwa dari sektor kampus dalam hal ini perguruan tinggi ikut

memberikan kontribusi melalui pelatihan pariwisata kepada masyarakat lokal. Komitmen sudah lumayan disadari untuk setiap stakeholders yang terlibat [14].

## **4.Sikap Saling Memahami ( Share Understanding)**

Pada pelaksanaan Collaborative Governance dalam pengembangan Desa wisata Budo ini didasarkan oleh kesamaan tujuan atau visi. Tujuan untuk mengembangkan kepariwisataan di Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Pihak pemerintah desa menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan atas dasar semangat untuk mengembangkan pariwisata dengan model desa wisata. Dari sektor swasta saat ini yang sudah bekerjasama ada dari PLN, dan Bank Indonesia.

## **5.Hasil sementara (Intermediate Outcomes)**

Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata Budo seperti memiliki tujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat lokal. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa desa wisata Budo menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Namun, pengelolaan masih bertumpuk pada kekuatan masyarakat lokal. Pengelola Desa Wisata Budo mengharapkan kerjasama secara berkelanjutan kepada seluruh stakeholder yang sudah bekerjasama untuk mengembangkan desa wisata ini. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat dan stakeholder terkait [15].

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini penulis menguraikan collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Budo, adapun hasil dari penelitian diuraikan berdasarkan indikator sebagai berikut; Face to Face (dialog tatap muka) Dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata Budo, pertemuan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tidak pernah dilakukan bersamaan. Dalam membangun kepercayaan melalui komunikasi masih kurang maksimal, hal ini disebabkan karena pertemuan dari sektor pemerintah, masyarakat, maupun swasta secara bersamaan belum pernah dilakukan. Komitmen sudah lumayan disadari untuk setiap stakeholders yang terlibat. Sikap saling memahami harus ditingkatkan lagi agar tidak bertumpuh pada peran satu sektor yang dominan. Selanjutnya, pengelola Desa Wisata Budo mengharapkan kerjasama secara berkelanjutan

kepada seluruh stakeholder yang sudah bekerjasama untuk mengembangkan desa wisata ini

## REFERENCES

- [1] Hausler N, "Planning for Community Based Tourism – A Complex and Challenging Task. The International Ecotourism Society," 2005.
- [2] A. F. Rachman, R. Suprina, S. Tinggi, and P. Trisakti, "Pendampingan Desa Cipasung Menuju Desa Wisata," *J. Pemberdaya. Pariwisata*, vol. 1, no. 1, p. 2019, 2019.
- [3] S. N. Nafsiah, M. Agustina, V. Sahfitri, and M. Marlindawati, "Eksplorasi Digital Marketing Sebagai Usaha Meningkatkan Pendapatan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pelaku UMKM Tanaman Hias Hafiz Flower," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Bina Darma*, vol. 2, no. 2, pp. 99–108, 2022, doi: 10.33557/pengabdian.v2i2.1725.
- [4] Y. S. Lewan, S. M. H. Mengko, and H. M. E. Kumaat, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Desa Budo Kabupaten Minahasa Utara," *J. Hosp. dan Pariwisata Ed.*, vol. 6, no. 1, pp. 343–352, 2023.
- [5] N. Komariah, E. Saepudin, and P. M. Yusup, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal," *J. Pariwisata Pesona*, vol. 3, no. 2, pp. 158–174, 2018, doi: 10.26905/jpp.v3i2.2340.
- [6] A. Mafaza and K. Setyowati, "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata," *J. Kebijak. Publik*, vol. 11, no. 1, p. 7, 2020, doi: 10.31258/jkp.11.1.p.7-12.
- [7] P. N. Yasintha, "Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.38043/jids.v4i1.2219.
- [8] Miles dan Huberman., "Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi).," 1992.
- [9] S. Jubaedah and O. Fajarianto, "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon," *Abdimas Awang Long*, vol. 4, no. 1, pp. 1–12, 2021, doi: 10.56301/awal.v4i1.121.
- [10] M. F. Ma'ruf, B. Kurniawan, and R. P. A. G. Pangestu, "Desa wisata: sebuah upaya mengembangkan potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa," *J. Din. Gov.*, vol. 7, no. 2, pp. 193–203, 2017.
- [11] W. Sari and S. Bakhri, "Pemberdayaan melalui pelatihan dan digitalisasi UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19," *IMEJ Islam. Manag. Empower. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, 2022, doi: 10.18326/imej.v4i1.1-18.
- [12] Ahmad Fitra Baiti Rahman, Amil, and Ilham Zitri, "Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat," *Nusant. Hasana J.*, vol. 3, no. 2, pp. 144–159, 2023, doi: 10.59003/nhj.v3i2.919.
- [13] F. Syah, "Strategi Mengembangkan Desa Wisata," *Pros. Semin. Nas. Multi Disiplin Ilmu & Call Pap. Unisbank Ke-3*, vol. 3, no. Sendi\_U 3, pp. 335–341, 2017.
- [14] S. Riska Chyntia Dewi, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *J. Dialekt. J. Ilmu Sos.*, vol. 19, no. 1, pp. 39–46, 2021, doi: 10.54783/dialektika.v19i1.62.
- [15] Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Ciputat: Nadi Pustaka, 2009.

